



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-NYA, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Semoga LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ini tetap mencerminkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Sarilamak, Februari 2024

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Wewenang .....	2
1.3. Isu – Isu Strategis .....	5
1.4. Permasalahan yang dihadapi .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. PRENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan .....	10
2.1.1. Visi .....	10
2.1.2. Misi .....	12
2.1.3. Sasaran .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 .....	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN</b>	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja .....	15
3.2. Analisa dan Capaian Kinerja .....	16
3.3. Realisasi Anggaran .....	42
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten .....	46
3.5. Prestasi Yang Diperoleh Tahun 2023 .....	47
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	48
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan .....	5
Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan .....	5
Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi .....	6
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator.....	16
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja 2023.....	16
Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1 .....	17
Tabel 3.4. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya .....	21
Tabel 3.5. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap .....	24
Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan .....	26
Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias .....	27
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah.....	29
Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan .....	31
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan .....	33
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina Kelompok .....	36
Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan .....	39
Tabel 3.12. Sasaran Strategis 2 .....	40
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	43
Tabel 3.14. Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten dan Tindak lanjut Dinas Perikanan.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun) .....	18
Gambar 3.2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya ....	21
Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun) .....	22
Gambar 3.4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap .....	24
Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan ( Ekor/ Tahun) .....	25
Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih .....	26
Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun) .....	27
Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan hias .....	27
Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor) .....	28
Gambar 3.10. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor) .....	29
Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan(Ton/ Tahun) .....	30
Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan .....	31
Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/ Tahun) .....	32
Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan .....	33
Gambar 3.15. Grafik Persentase cakupan bina kelompok .....	34
Gambar 3.16. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan .....	36
Gambar 3.17. Grafik Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun) .....	37
Gambar 3.18. Dokumentasi kegiatan Tingkat Konsumsi Makan Ikan .....	39
Gambar 3.19. Kabupaten Lima Puluh Kota meraih Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan se Provinsi Sumatera Barat.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, Transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya

Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun LKjIP Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan (LKjIP) Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota bertujuan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja Tahun 2023. dan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## **1.2. TUGAS DAN WEWENANG**

### **a) Kedudukan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan

### **b) Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok :

Dinas Perikanan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perikanan

Fungsi :

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**c) Struktur Organisasi**

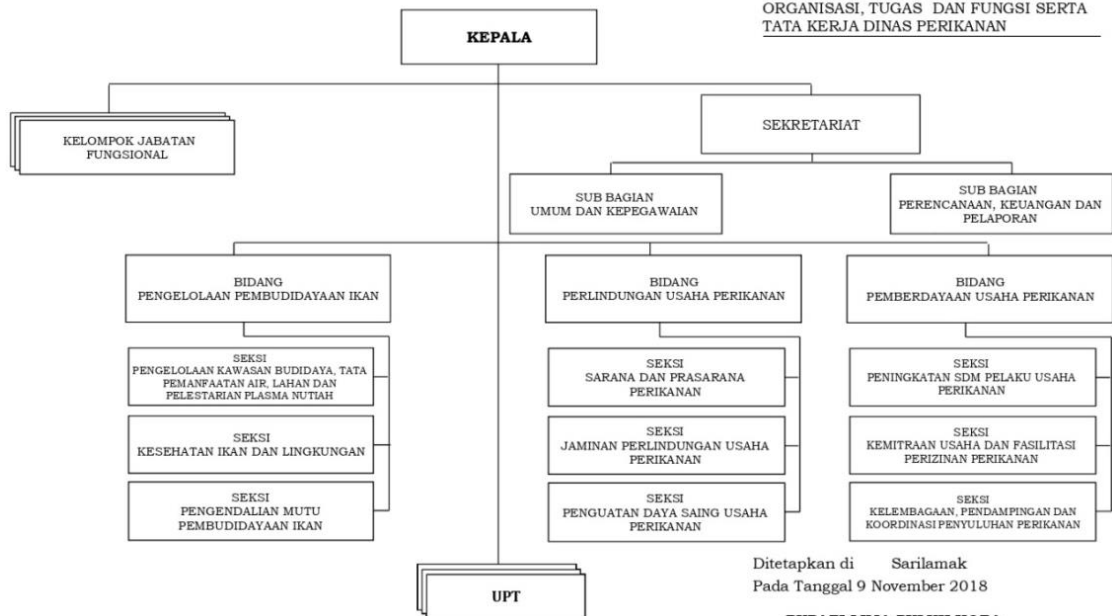
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat. terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah
    2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
    3. Seksi Pengendalian Mutu dan Pembudidayaan Ikan
  - d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan. terdiri dari:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
    2. Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan
    3. Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan
  - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan. terdiri dari:
    1. Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan
    2. Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan
    3. Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluh Perikanan
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
**DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 80 Tahun 2018  
 TANGGAL : 9 November 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN



Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada Tanggal 9 November 2018

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**

#### d) SDM Pegawai /Aparatur

Jumlah aparatur Pemerintah di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebanyak 55 orang yang terdiri dari 18 orang PNS, 20 orang CPNS dan 16 orang Tenaga Kontrak. Penyuluh Perikanan yang berjumlah 13 Orang yang terdiri dari 6 orang Penyuluh PNS dan 6 Orang Penyuluh Perikanan Bantu berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari tingkat pendidikan aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	5 Orang	
2	Strata 1 (SI)	30 orang	
3	Diploma III ( D III)	2 orang	
4	SMU	1 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>38 Orang</b>	

Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	-	
2	Strata 1 (SI)	4 Orang	
3	Diploma III ( D III)	3 Orang	
4	SMA	5 Orang	
5	SD	4 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>16 Orang</b>	

### 1.3 ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya
2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan
9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

#### 1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 1.3

Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya	1. Belum optimalnya	1. Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Produksi dan produktivitas perikanan	produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>perikanan (skema investasi)</li> <li>2. Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun</li> <li>3. Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun</li> <li>4. Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan</li> <li>5. Masih sedikitnya jumlah obat-obatan ikan</li> <li>6. Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air</li> <li>7. Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan</li> <li>8. Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB</li> <li>9. Masih rendahnya jumlah benih, calon induk dan pakan yang didistribusikan</li> <li>10. Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan</li> </ul>
		2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis</li> <li>2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis</li> <li>3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai</p>
		<p>3. Belum Optimalnya Produksi Tangkap dan Konsumsi Ikan</p>	<p>1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)</p> <p>2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan</p> <p>3. Masih rendahnya jumlah asuransi pembudidaya ikan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan</p> <p>7. Masih rendahnya jumlah promosi penguatan daya saing</p>

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Wewenang
- 1.3. Isu isu strategis
- 1.4. Permasalahan yang dihadapi
- 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 1.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan
  - 1.1.1 Visi
  - 1.1.2 Misi
  - 1.1.3 Tujuan dan Sasaran
  - 1.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.2. Perjanjian Kinerja

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- 3.2. Pengukuran Kinerja 2023
- 3.3. Realisasi Anggaran
- 3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten

### **BAB IV : PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN**

##### **2.1.1 Visi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah

untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi ini juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, propinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak, karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di sektor perikanan secara menyeluruh.

Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas / daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani. Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah”

**Madani** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan,



toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beradat dan Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. Nilai-nilai Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

### **2.1.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani. Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah telah dirumuskan melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Misi diatas. maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan. Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kepala Daerah menetapkan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Adapun Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi
4. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agrobisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Selanjutnya program unggulan daerah dituangkan dalam 5 misi Kepala Daerah. Dinas Perikanan melalui Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral dengan program unggulan : Pemanfaatan/pembukaan lahan baru perikanan seluas 1.000 Ha dan menghasilkan 20 juta bibit ikan perbulan.

### **2.1.3. Tujuan dan Sasaran**

Untuk merealisasikan misi. tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### PERUBAHAN PENJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN : 2023

#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan yang Unggul	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,6
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Persentase Target PAD pada Dinas Perikanan	54.9
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN terhadap Pelayanan Dinas Perikanan	84.45

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 3.041.386.872	
2)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.	Rp. 193.804.500	
3)	Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Rp. 1.023.409.000	
4)	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 99.784.000	

Pada Tahun 2023 Dinas Perikanan melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran **Rp. 4.358.384.372.-**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN**

#### **3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, strategi dari suatu instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perikanan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang

ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 menyajikan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3,6	3,64	101,11	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75	67	89,33	Tinggi

Rata rata Capaian indikator Kinerja sangat tinggi

### 3.2 ANALISA DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja

Dinas Perikanan mengalami perubahan anggaran yaitu anggaran awal berjumlah Rp. 4.137.481.158 yang tertulis di Penetapan Kinerja 2023. Pada perubahan Anggaran bertambah menjadi Rp. 4.358.384.372

Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis berserta analisisnya :

#### 1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Tahun 2023 Target Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Dinas Perikanan adalah 3.6% dengan realisasi melampaui angka target yakni 3,64%. Perhitungan angka tersebut dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB ada beberapa Faktor yang mendukung

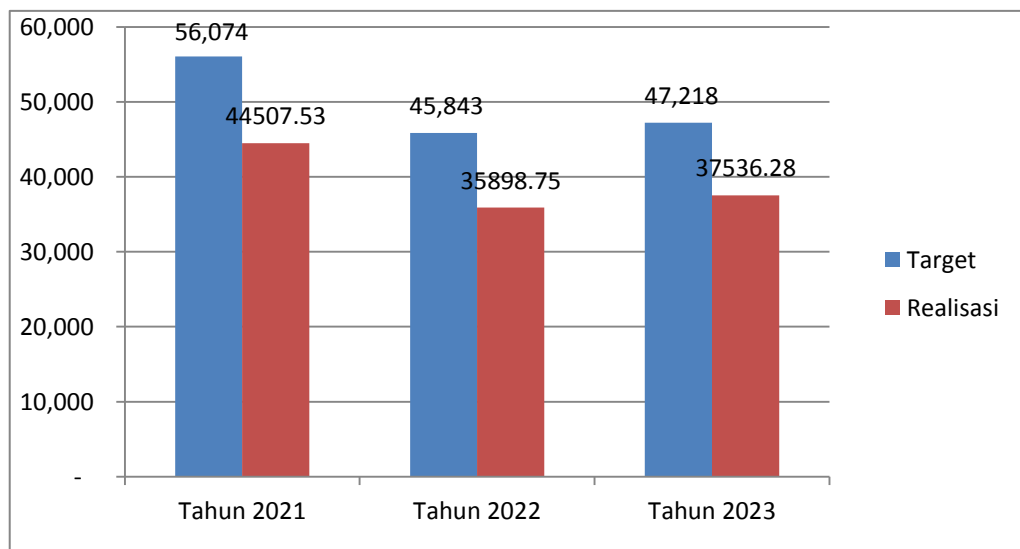
Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1

<b>Sasaran Strategis 1</b>						
<b>Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan</b>						
<b>Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB</b>						
<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% Realisasi 2023</b>	<b>Predikat</b>
Produksi Budidaya (ton)	45.843	35.898,73	47,218	37,536.28	79.50	Tinggi
Produksi Tangkap (ton)	3.700	3.296.24	3,900	3,545.96	90.92	Sangat Tinggi
Produksi benih Ikan (ekor)	459.066.674	75.561.400	472,838,674	78.791.350	16.66	Sangat Rendah
Produksi Ikan Hias (ekor)	7.265.620	26.414.605	7,483,589	13,760,700	183.88	Sangat Tinggi
Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)	465.560	4.060.975	479,527	2,096,300	437.16	Sangat Tinggi
Produksi hasil olahan (ton)	365	344.681	365	309.863	84.89	Tinggi
Tingkat Produktifitas Perikanan	4.64 Ton/Ha	7.5 Ton/Ha	4.77	7,66	160,52	Sangat Tinggi
Cakupan Bina	79	71	81	73	90,12	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan						
Kelompok (%)						
Tingkat Konsumsi Makan Ikan ( Kg/ Kapita/ Tahun	38.5 Kg/Kapita/Tahun	39.90 Kg/Kapita/Tahun	39 Kg/Kapita/Tahun	40,11 Kg/Kapita/Tahun	102,85 Kg/Kapita/Tahun	Sangat Tinggi

### 1) Produksi budidaya

Produksi Budidaya pada Tahun 2023 belum mencapai target yaitu 47.218 Ton dengan realisasi 37.536,28 Ton. Namun Produksi budidaya tahun 2023 meningkat dari Tahun 2022. Grafik peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi penurunan produksi budidaya dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dan terjadi peningkatan pada Tahun 2023 sebanyak 4,56%.

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangkan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, Keramba sungai, dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh

Kota kegiatan paling banyak di Lakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, pada Tahun 2023 Dinas Perikanan sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Kegiatan pembinaan kepada Pokdakan baik melalui kegiatan bimbingan teknis cara budidaya ikan yang baik atau pun pembinaan melalui penyuluh perikanan, memberikan bantuan benih dan pakan Ikan, demplot budidaya ikan untuk Pokdakan, memberikan bantuan berupa obat-obatan untuk penyakit ikan. Selain itu Dinas Perikanan juga memberikan beberapa paket budidaya ikan dalam ember (budikdamber) kepada 120 KK miskin yang tersebar di 4 Nagari. Belum tercapainya target produksi perikanan Budidaya disebabkan sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan, kurangnya ketersediaan bibit ikan unggul dan musibah banjir yang terjadi diakhir tahun.







Bimbingan Teknis



Bantuan Demplot pembesaran Ikan



Pemantauan Peredaran Obat





Pengujian sampel ikan



Bantuan Budikdamber

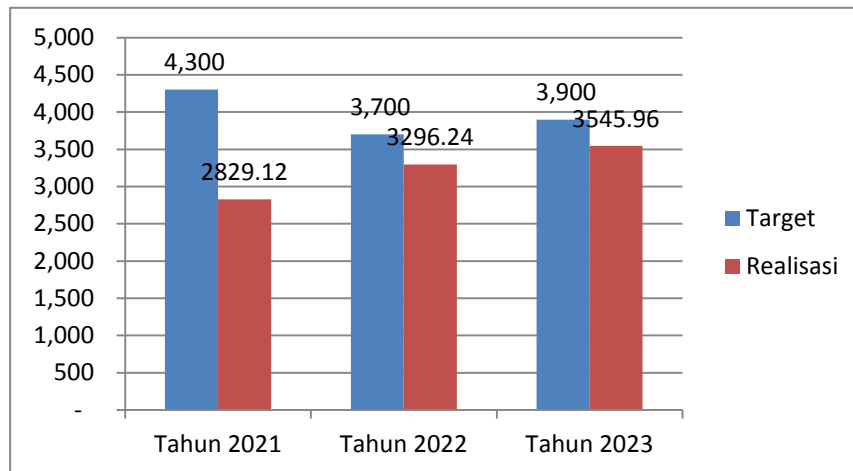
Gambar 2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya

Tabel 3.4. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>1.023.409.000</b>	<b>1.020.769.295</b>	<b>99.74</b>	<b>100</b>
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Kecil	540.459.900	539.443.795	99.81	100
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	232.056.500	231.610.500	99.81	100
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.892.600	249.715.000	99.53	100

## 2) Produksi Tangkap

Untuk indikator jumlah produksi Perikanan tangkap yang dihasilkan pada tahun 2023 dari Target 3.900 ton realisasi yaitu 3.545,96 Ton. Dibandingkan pada Tahun 2022 dengan produksi 3.296.24 Ton terjadi peningkatan produksi. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun)

Dari grafik diatas, terjadi peningkatan produksi dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini merupakan hasil kerja keras Dinas Perikanan yang telah melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll kepada nelayan yang terkategori KK miskin serta melakukan Restocking di Perairan Umum.



Bantuan perahu dan mesin perahu





Hasil Tangkapan Nelayan



Penebaran benih ikan untuk Pokmaswas



Pembinaan Kelompok Nelayan



Bimbingan Teknis

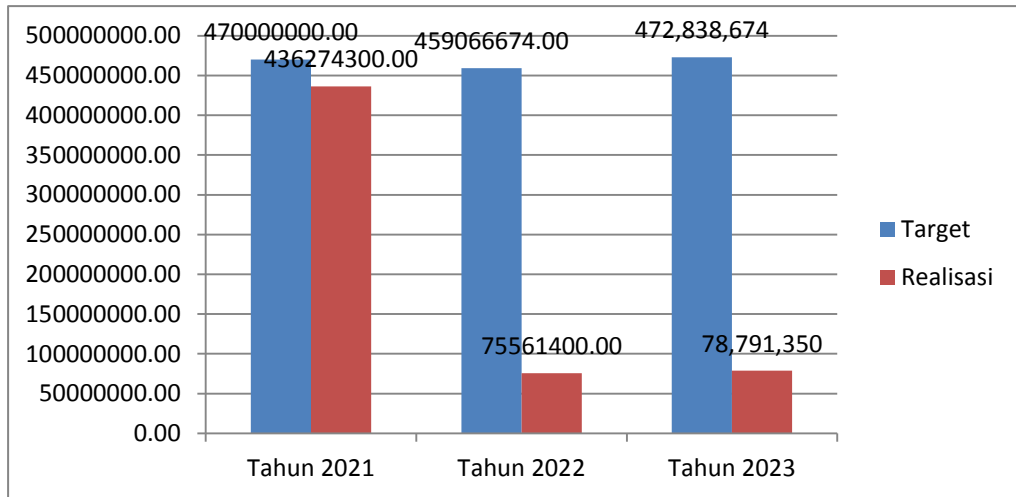
Gambar 4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap

Tabel 3.5. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.534.500</b>	<b>79.323.600</b>	<b>99.73</b>	<b>100</b>
1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	79.534.500	79.323.600	99.73	100
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114.270.000</b>	<b>112.968.800</b>	<b>98.86</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	114.270.000	112.968.800	98.86	100

### 3) Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan yang dihasilkan pada tahun 2023 belum mencapai target produksi yaitu target 472,838,674 ekor dengan realiasi 78.791.350 ekor. Terjadi peningkatan produksi Benih Ikan pada tahun dari Tahun 2022 seperti yang terlihat pada diagram berikut ini



Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan ( Ekor/ Tahun)

Belum tercapainya target produksi benih ini disebabkan karena kurangnya induk ikan dan tingginya tingkat kematian benih di tingkat pendederan yang disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan dan penyakit. Jika dilihat dari grafik, target untuk produksi benih memang relatif tinggi sesuai dengan yang tertulis pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Penyusunan target ternyata tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini lah yang menyebabkan jauhnya angka realisasi terhadap target produksi benih.

Untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas Pada tahun 2023 Dinas Perikanan sudah memberikan calon induk ikan nila dan lele untuk beberapa Pokdakan. Selain itu Dinas Perikanan juga telah melaksanakan bimtek Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Benar pada beberapa Pokdakan





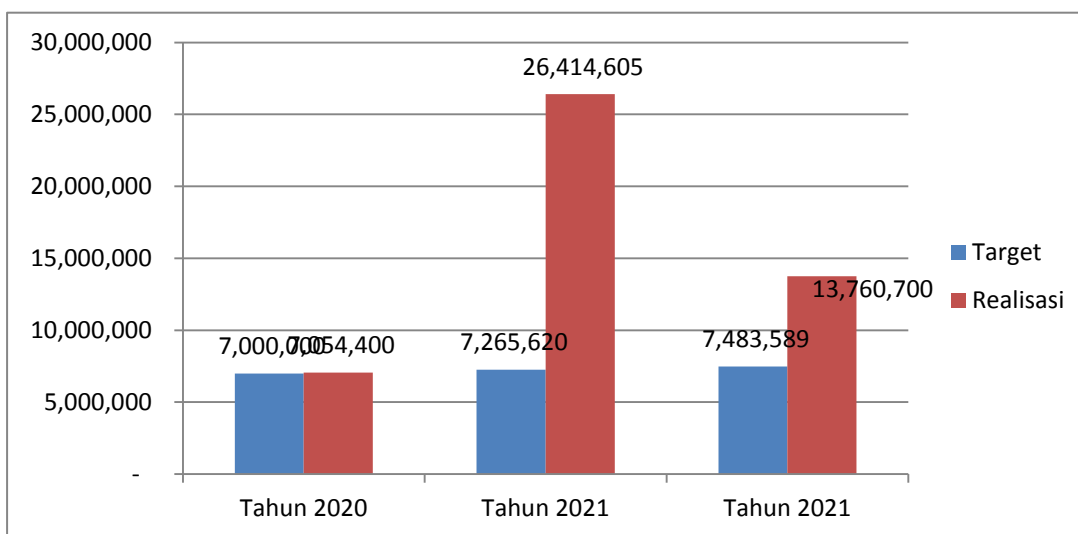


Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih ikan  
Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>1.023.409.000</b>	<b>1.020.769.295</b>	<b>99.74</b>	<b>100</b>
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Kecil	540.459.900	539.443.795	99.81	100
2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	232.056.500	231.610.500	99.81	100
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.892.600	249.715.000	99.53	100

#### 4) Produksi Ikan hias

Produksi benih ikan hias yang dihasilkan sudah melebihi target produksi yaitu target 7.483.589 ekor dengan realiasi 13.760.700 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish.



Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun)

Dari Grafik diatas dapat di lihat terjadi peningkatan Produksi Ikan Hias dari Tahun 2021-2022 dan penurunan pada Tahun 2023. Untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias Dinas Perikanan memberikan bantuan calon induk ikan hias kepada UPR.



Bantuan Calon induk ikan hias

Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan Hias

Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya	540.459.900	539.443.795	99.81	100

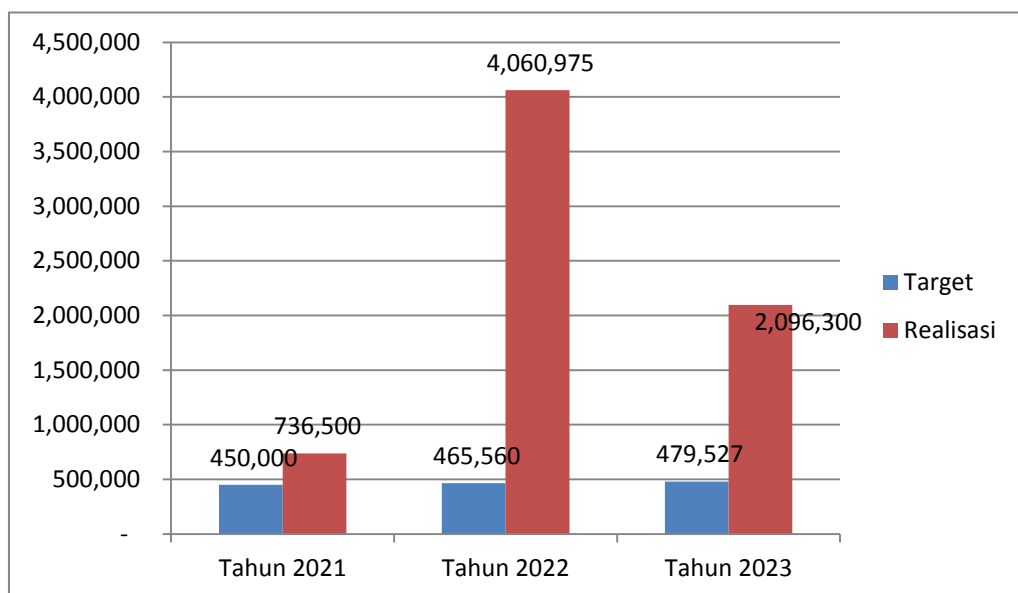


No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
	Kecil				
2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.892.600	249.715.000	99.53	100

### 5) Produksi Produk Unggulan Daerah

Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.

Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 dengan target produksi 479.527 ekor dengan realisasi jauh melebihi target yakni 2.096.300 ekor. Produksi Gurami Sago dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan produksi dari Tahun 2021-2022 dan terjadi penurunan produksi pada Tahun 2023. Untuk meningkatkan produksi Ikan gurami sago Dinas Perikanan sudah memberikan bantuan calon induk Gurami Sago kepada beberapa Pokdakan serta pembinaan-pembinaan kepada kelompok budidaya.



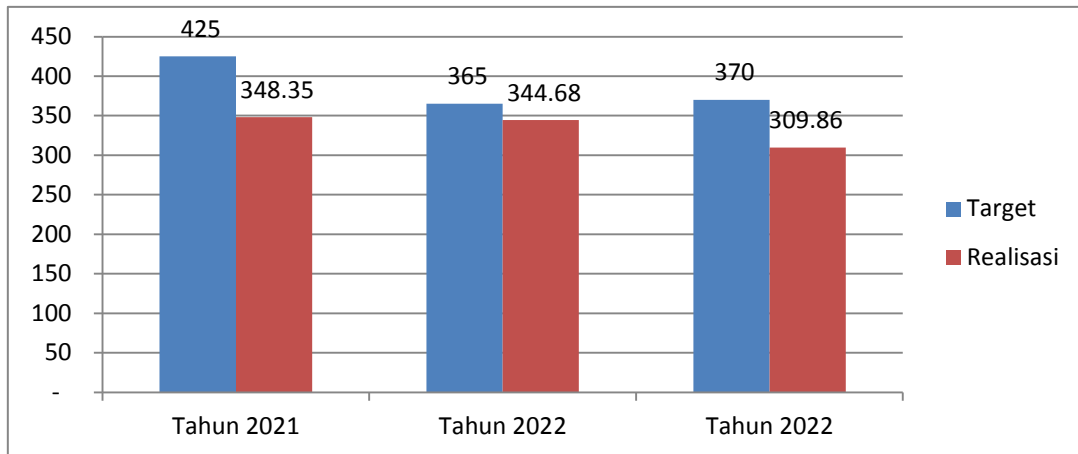
Bantuan benih ikan Gurami sago

Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan mendukung produksi Gurami Sago  
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Kecil	540.459.900	539.443.795	99.81	100
2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.892.600	249.715.000	99.53	100

#### 6) Produksi hasil olahan

Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2023 adalah 309,863 ton dengan target 370 ton. Dibandingkan Tahun 2022 dengan realisasi 344,68 ton terjadi penurunan produksi. Produksi olahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan (Ton/Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi penurunan produksi dari tahun 2021-2023. Penurunan produksi ini disebabkan adanya persaingan pasar yang tidak sehat juga mempengaruhi terjadinya penurunan produksi ini. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perikanan telah memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolahan perikanan.



Peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu



Pembinaan Poklashar



Kegiatan pengasapan ikan

Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan

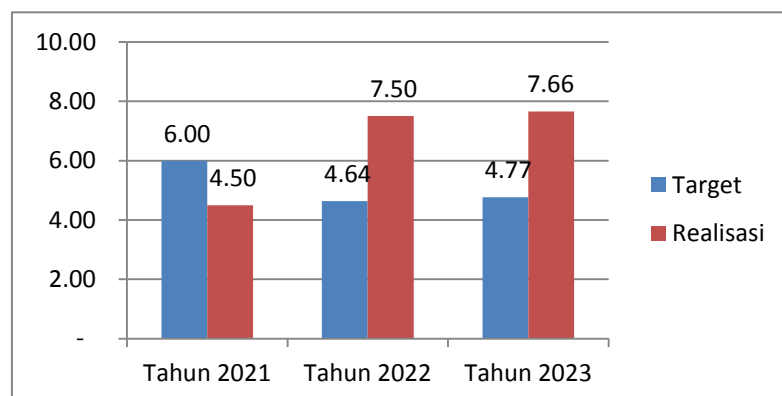
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>				
1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.892.600	249.715.000	99.53	100



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
2)	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>				
	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>				
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	99.784.000	99.105.900	99.32	100

### 7) Tingkat Produktifitas Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 7,66 ton/Ha dari Target 4,77 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi. Tingkat produktifitas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/Ha)

Untuk meningkatkan produktifitas dilakukan dengan cara Extensifikasi dan Intensifikasi. Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2023 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru.

Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara

pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan.



Extensifikasi kolam baru dengan memanfaatkan escavator



Bimtek CPIB

Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan

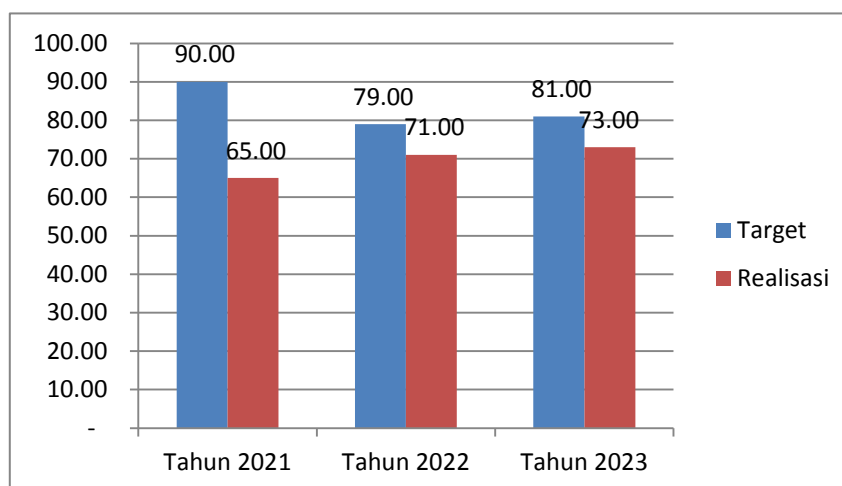
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>1.023.409.000</b>	<b>1.020.769.295</b>	<b>99.74</b>	<b>100</b>
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Kecil	540.459.900	539.443.795	99.81	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	232.056.500	231.610.500	99.81	100
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.892.600	249.715.000	99.53	100

### 8) Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tahun 2023 tidak mencapai target yaitu dari target 81% tercapai 73%. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi secara teknis oleh Aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan.



Gambar 3.15. Cakupan Bina Kelompok (Persentase/Tahun)

Dari grafik diatas, dapat dilihat terjadi Peningkatan cakupan bina kelompok dari Tahun 2021-2023 namun belum mencapai target. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan, Bantuan saran dan prasarana, serta pembinaan. Bantuan yang disalurkan kepada



Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan serta pembinaan. Untuk kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah bantuan yang diberikan hanya berupa pembinaan. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap, serta pembinaan.



Pembinaan yang dilaksanakan Oleh Dinas dan Penyuluh Perikanan





### Bimbingan Teknis

Gambar 3.16. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan

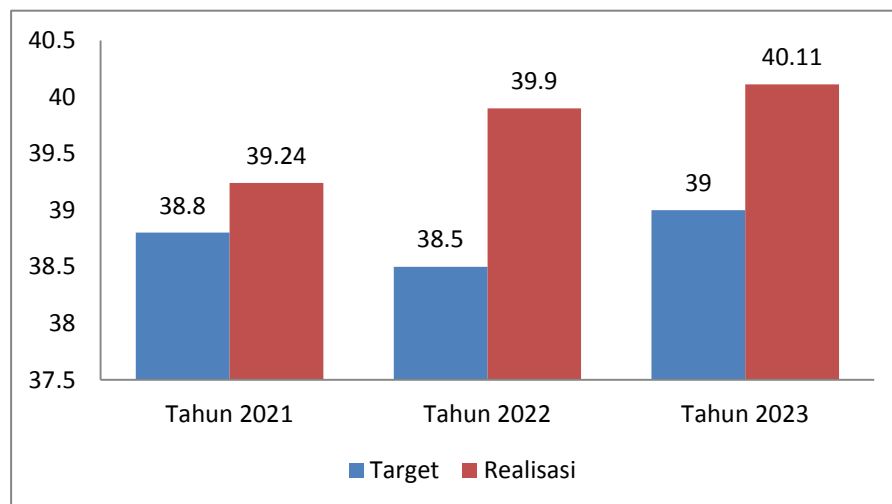
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina kelompok

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
1)	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.534.500</b>	<b>79.323.600</b>	<b>99.73</b>	<b>100</b>
1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	79.534.500	79.323.600	99.73	100
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114.270.000</b>	<b>112.968.800</b>	<b>98.86</b>	<b>100</b>
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	114.270.000	112.968.800	98.86	100
2)	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>1.023.409.000</b>	<b>1.020.769.295</b>	<b>99.74</b>	<b>100</b>
1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Kecil	540.459.900	539.443.795	99.81	100
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	232.056.500	231.610.500	99.81	100
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	250.892.600	249.715.000	99.53	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
3)	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>99.784.000</b>	<b>99.105.900</b>	<b>99.32</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>99.784.000</b>	<b>99.105.900</b>	<b>99.32</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.784.000	99.105.900	99.32	100

### 9) Tingkat Konsumsi Makan Ikan :

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 sudah melebihi target yaitu 39 Kg/kapita/tahun dengan realisasi 40,11 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat Konsumsi makan ikan meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.17. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Dari Grafik diatas terlihat tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat setiap tahunnya dan sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi

produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak-otak ikan. Dinas Perikanan juga telah melaksanakan Lomba masak ikan, lomba mewarnai ikan Tingkat TK/Paud se Kabupaten serta Lomba menyanyi lagu Makan Ikan dalam upaya mengajak masyarakat untuk makan ikan.

Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat Baliho.



Baliho Ayo Makan Ikan



Standing Banner Ayo Makan Ikan



Lomba Masak serba ikan, menyanyi lagu makan ikan tingkat TK dan PAUD serta  
Lomba mewarnai Ika

Gambar 3.18. Kegiatan yang mendukung Peningkatan Konsumsi

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>369,979,900</b>	<b>313,928,328</b>	<b>84.85</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>254,629,000</b>	<b>200,342,000</b>	<b>78.68</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	254,629,000	200,342,000	78.68	100



2) Tabel 3.12. Sasaran Strategis 2

<b>Sasaran Strategis 2 :</b>						
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>% Realisasi 2023</b>	<b>Predikat</b>
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75	63,11	75	67	89.3	Tinggi

1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP Dinas Perikanan yang di evaluasi oleh Inspektorat adalah SAKIP Tahun 2022. Dari hasil evaluasi Inspektorat tersebut SAKIP Dinas Perikanan mendapat nilai 67 dengan kategori B dengan pengertian Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,60

- 1) Membuat Indikator Kinerja dengan memenuhi kriteria SMART (Spesific = spesifik, Measureable = Terukur, Attainable = Bisa dicapai, Relevant = Ada keterkaitan, Timebound = Jangka Waktu)
- 2) Menetapkan target perencanaan kinerja yang memungkinkan untuk dicapai, menantang dan realistis (pastikan target tidak begitu tinggi agar dapat dicapai)
- 3) Melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja sehingga mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik (Dokumen Perubahan Renja menjadi Perubahan DPA, Revisi Perjanjian Kinerja)

Tanggapan :

1. Target perencanaan kinerja seperti Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan telah dikunci pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 sehingga target tidak bisa diturunkan. Untuk itu jika nanti ada perubahan pada Renstra, Dinas Perikanan akan menetapkan target yang lebih bisa dicapai.



2. Penyusunan Perubahan Renja dilaksanakan pada Bulan September sesuai dengan arahan Bapelitbang, sementara Perubahan Anggaran dilaksanakan pada Bulan November, sehingga Anggaran yang tertulis pada Renja Perubahan belum mencantumkan angka Anggaran Perubahan. Untuk revisi Perjanjian Kinerja, sesuai dengan arahan Bagian Organisasi, revisi perjanjian kinerja hanya dibuat oleh Kepala Dinas. Dinas Perikanan sudah membuat revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 18,6

- 1) Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Pengumpulan Data kinerja (screenshot aplikasi)
- 2) Melakukan evaluasi anjab sebagai pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional sehingga mempengaruhi penyesuaian refocusing organisasi (evaluasi anjab dan SOTK)
- 3) Melakukan evaluasi rencana aksi terhadap strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja (hasil rapat rencana aksi)

Tanggapan :

1. Dinas Perikanan belum memiliki aplikasi dalam pengumpulan data. Sistem pengumpulan data masih secara langsung ataupun menggunakan aplikasi Whastapp.
2. Dinas Perikanan belum melakukan evaluasi anjab.
3. Dinas Perikanan sudah melaksanakan rapat terkait pembahasan rencana aksi hampir setiap bulannya.

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,55

- 1) Menginfokan perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada BAB III Laporan Kinerja

Tanggapan :

1. Laporan LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2023 sudah mencantumkan persentase capaian kinerja dan Kategori Penilaian Keberhasilan kinerja.

#### D. Evaluasi Internal dengan nilai 15,25

- 1) OPD mempunyai pedoman teknis terkait evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Pedoman teknis/SOP)
- 2) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga bisa meningkatkan nilai AKIP (tindak lanjut rekomendasi Dokumen LKjIP tahun lalu)
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja (uraian efektifitas dan efisiensi kinerja kondisi tahun lalu)

Tanggapan :

1. Dinas perikanan belum memiliki SOP terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namu Dinas Perikanan telah memiliki SOP Pembuatan Laporan Bulanan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
2. Dinas Perikanan telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD dan Dana Insentif Fiskal sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>4.358.384.372</b>	<b>4.325.537.872</b>	<b>99.25</b>
<b>3.25.XX.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.041.386.872</b>	<b>3.013.370.277</b>	<b>99.08</b>

Kode Rekening	Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
<b>3.25.XX.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.769.991.972</b>	<b>2.757.664.420</b>	<b>99.55</b>
3.25.XX.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.769.991.972	2.757.664.420	99.55
<b>3.25.XX.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93.159.900</b>	<b>92.964.469</b>	<b>99.79</b>
3.25.XX.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.271.000	1.271.000	100.00
3.25.XX.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.682.700	26.673.550	99.97
3.25.XX.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.100	2.000.100	100.00
3.25.XX.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.280.100	11.280.100	100.00
3.25.XX.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.042.000	2.980.000	97.96
3.25.XX.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.150.000	3.145.500	99.86
3.25.XX.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.734.000	45.614.219	99.74
<b>3.25.XX.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.460.000</b>	<b>36.022.788</b>	<b>70.00</b>
3.25.XX.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100.00
3.25.XX.20.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi.	49.460.000	34.022.788	68.79

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Realisasi</b>
	Sumber Daya Air dan Listrik			
<b>3.25.XX.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.775.000</b>	<b>126.718.600</b>	<b>99.96</b>
3.25.XX.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.825.000	124.773.600	99.96
3.25.XX.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000	1.945.000	99.74
<b>3.25.XX.03</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>193.804.500</b>	<b>192.292.400</b>	<b>99.22</b>
<b>3.25.XX.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.534.500</b>	<b>79.323.600</b>	<b>99.73</b>
3.25.XX.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	79.534.500	79.323.600	99.73
<b>3.25.XX.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114.270.000</b>	<b>112.968.800</b>	<b>98.86</b>
3.25.XX.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	114.270.000	112.968.800	98.86
<b>3.25.XX.04</b>	<b>Program</b>	<b>1.023.409.000</b>	<b>1.020.769.295</b>	<b>99.74</b>

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Realisasi</b>
	<b>Perikanan Budidaya</b>			
<b>3.25.XX.04.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>1.023.409.000</b>	<b>1.020.769.295</b>	<b>99.74</b>
3.25.XX.04.2.02 .01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	540.459.900	539.443.795	99.81
3.25.XX.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	232.056.500	231.610.500	99.81
3.25.XX.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	250.892.600	249.715.000	99.53
<b>3.25.XX.06</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>99.784.000</b>	<b>99.105.900</b>	<b>99.32</b>
<b>3.25.XX.06.2.01</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>99.784.000</b>	<b>99.105.900</b>	<b>99.32</b>
3.25.XX.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.784.000	99.105.900	99.32



### 3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota atas Dokumen LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2021, ada beberapa rekomendasi yang diberikan untuk Dinas Perikanan agar ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal, Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Beberapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti antara lain :

Tabel 3.14. Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten dan Tindak lanjut Dinas Perikanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar Renstra dipublikasikan	Renstra sudah dipublikasikan pada website Dinas Perikanan
2	Agar target jangka menengah dalam renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	Pencapaian kinerja Renstra telah dimonitor secara berkala dan dibuktikan dengan dokumen Evaluasi RKPD.
3	Agar Laporan kinerja belum diunggah ke dalam website	Laporan kinerja sudah diunggah kedalam website
4	Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya menyajikan data terkait keberhasilan dan kegagalan program	Dalamn LKjIP Tahun 2023 sudah menyajikan tabel atas keberhasilan/kegagalan kinerja yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.5. PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2023

Dinas Perikanan melalui Bidang Perlindungan Usaha Perikanan mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Axana Hotel Padang. Perwakilan peserta dari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Dini Supriatin dan Vivin Ayu Oktaviani.

Diversifikasi olahan ikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan Angka Konsumsi Ikan serta melakukan pencegahan terhadap stunting. Salah satu strateginya yaitu dengan mengkonsumsi ikan yang telah diolah menarik yang membutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam masakan olahan hasil perikanan.

Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil memenangkan 3 kategori lomba yakni Juara II kategori Menu Balita, Juara I kategori Menu Keluarga, dan Juara I kategori Menu Kudapan



Gambar. 3.19. Kabupaten Lima Puluh Kota meraih Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan se Provinsi Sumatera Barat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Perikanan memiliki 2 sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan

Pada Tahun 2023 Dinas Perikanan berhasil meraih predikat sangat baik untuk pencapaian sasaran strategis yang sebagaimana targetnya sudah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023.

#### **4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang**

Capaian kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa akan datang.

Demikian Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya. semoga dapat bermanfaat.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak. Februari 2024



**MOHD. SISWANTO. S.Pi. M.Si**  
NIP. 19710808 199803 1 004